



PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Johar Nomor 17 Telp. (031) 99092900 Fax. (031) 99092414
dpmptsp@jatimprov.go.id
Surabaya 60174



dpmptsp.jatim



DPM PTSP Jawa Timur



dpmptsp.jatimprov.go.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan TW II Tahun Berkenaan	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan TW II	7
2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	22
Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	
3.1 Tujuan dan Sasaran	23
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023	24
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	39
Bab IV Penutup	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur S/D TW II Tahun 2023	8
Tabel 3.1 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023.....	25
Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perubahan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berpedoman kepada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur menyusun Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023.

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah (PD) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Adapun program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam Perubahan Renja PD tersebut disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pendanaan dan pagu indikatif serta urusan wajib atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

1.2 Landasan Hukum

Berikut merupakan landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1956 Tahun 2017);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

1.3 Maksud Dan Tujuan

- **Maksud**

Maksud penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2023 adalah untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran khususnya pada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Timur dalam

mengimplementasikan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023.

- **Tujuan**

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah;
- 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan perubahan rencana anggaran perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II
- 2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Bab III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1 Tujuan Dan Sasaran
- 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
- 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Timur tahun 2023 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Timur Tahun 2019 – 2024 dan Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Target Renstra
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
s/d Triwulan II Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
01.18	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase indikator program yang tercapai</i>	76	100	76	88,5	116%	77	0	0%
		<i>Persentase realisasi anggaran</i>	90	91,13	90	96,59	107%	90	36	40%
		<i>Indeks profesionalitas ASN</i>	86,25	86,25	86,25	86,25	100%	86,27	0	0%
2.18.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah</i>	11	11	9	9	100%	-	20	100%
		<i>Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah</i>	1	4	4	4	100%	-	5	100%
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran, dan Pelaporan Perangkat Daerah</i>	34	-	-	-	-	13	6	46%
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	11	11	7	7	100%	4	2	50%
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1	1	1	1	100%	-	2	100%
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	4	-	-	-	-	2	0	0%
2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1	1	1	1	100%	-	2	100%
		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan	4	-	-	-	-	2	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	4	1	4	4	100%	-	5	100%
		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	4	-	-	-	-	2	0	0%
2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	4	1	4	4	100%	-	5	100%
		Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	4	-	-	-	-	2	0	0%
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja	11	4	11	11	100%	-	15	100%
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20	-	-	-	-	5	2	40%
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	1	4	1	1	100%	-	5	100%
		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	-	-	-	-	4	2	50%
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12	12	12	12	100%	12	6	50%
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	12	12	100%	-	12	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	140	-	-	-	-	140	140	100%
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	48	-	-	-	-	12	6	50%
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12	12	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	48	-	-	-	-	12	6	50%
2.18.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah	12	12	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	48	-	-	-	-	12	6	50%
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Keuangan SKPD	2	2	2	2	100%	-	2	100%
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	8	-	-	-	-	2	0	0%
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	jumlah dokumen tanggapan atas LHP	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	4	-	-	-	-	1	0	0%
2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12	12	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah laporan keuangan	48	-	-	-	-	12	6	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD								
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1	1	1	100%	-	1	100%
2.18.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan	1	1	1	1	100%	-	1	100%
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12	12	12	12	100%	12	6	50%
2.18.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	12	12	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	48	-	-	-	-	8	4	50%
2.18.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12	12	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	48	-	-	-	-	12	6	50%
2.18.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP	12	12	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	48	-	-	-	-	12	6	50%
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4	-	-	-	-	4	2	50%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
2.18.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah laporan Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	1	1	1	1	100%	-	1	100%
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1	8	1	1	100%	1	0	0%
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	-	-	-	-	1	0	0%
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	-	-	-	-	7	3	43%
2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	-	-	-	-	3	1	33%
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	-	-	-	-	3	1	33%
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	-	-	-	-	1	0	0%
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah paket pengadaan	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4	-	-	-	-	25	15	60%
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan	3	1	3	3	100%	-	4	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4	-	-	-	-	2	0	0%
2.18.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital	1	3	3	3	100%	-	3	100%
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	3	1	1	100%	1	0	0%
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	48	-	-	-	-	12	6	50%
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	-	-	-	-	1	0	0%
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah paket pelayanan umum	1	-	1	1	100%	-	-	-
		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	-	-	-	-	1	0	0%
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	1	1	1	1	100%	1	0	0%
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan	4	-	-	-	-	62	30	48%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		dibayarkan pajaknya								
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	1	1	1	100%	116	50	43%
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah gedung kanntor dan bangunan lainnya yang dipelihara/dirahabilitasi	4	-	-	-	-	1	0	0%
02.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	-	3,75	3,75	100%	4	0	0%
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang Diberikan	100	-	100	150	150%	100	0	0%
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Bahan Rumusan/Rekomendasi Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	-	1	2	200%	-	2	100%
		Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1	-	-	-	-	1	1	100%
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah evaluasi pelaksanaan pemberian pemberian/ insentif dan kemudahan penanaman modal	1	1	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di	1	-	-	-	-	8	0	0%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		daerah								
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Potensi Investasi yang Siap Ditawarkan	100	-	100	100	100%	100	0	0%
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Penyusunan dan Evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	1	-	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah peraturan daerah (Perda) rencana umum penanaman modal daerah provinsi	1	-	-	-	-	1	0	0%
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Dokumen Potensi dan Peluang Penanaman Modal	2	1	2	2	100%	-	3	100%
		Jumlah UKM Yang Difasilitasi Kemitraan Antar Dunia Usaha	12	-	12	14	117%	-	14	100%
		Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha provinsi	2	-	-	-	-	1	0	0%
02.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai komitmen/rencana penanaman modal	70	-	35	46,42	133%	40	19	47,5%
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase calon penanam modal yang berminat	1	-	75	75	100%	75	35	46,6%
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan promosi penanaman modal	2	-	2	2	100%	-	2	100%
		Jumlah peraturan daerah yang mengatur promosi penanaman modal provinsi	1	-	-	-	-	1	0	0%
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Fasilitas Kerjasama Penanaman Modal	2	-	2	2	100%	-	2	100%
		Jumlah Fasilitas Pelayanan Pra Perizinan Penanam Modal	32	-	32	32		-	32	100%
		Jumlah Promosi Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri	7	5	7	9		-	14	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah Sarana Prasarana Promosi Penanaman Modal	3	3	3	3		-	3	100%
		Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal provinsi	1	-	-	-	-	25	18	72%
02.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	90	-	86	88,36	103%	87	88	100%
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Perizinan/non izin Yang Tepat waktu sesuai SOP	86	-	86	86	100%	87	88	100%
		Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100%	100	100	100%
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin/non izin sektor pembangunan dan perekonomian yang diterbitkan	110	-	110	375	341%	-	375	100%
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	100	606	606%
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pembangunan dan perekonomian	110	-	110	375	341%	-	375	100%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non	100	-	-	-	-	100	72	72%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha								
2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah laporan penyelenggaraan PTSP daerah	4	-	4	4	100%	-	4	100%
		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	-	-	-	-	140	43	31%
2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	38	-	38	21	55%	-	-	100%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	38	-	-	-	-	38	4	11%
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	86	-	86	86	100%	87	88	100%
		Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	100	-	100	100	100%	100	100	100%
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah izin/non izin sektor pembangunan dan perekonomian yang diterbitkan	3250	-	3250	24303	748%	-	24303	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
	Secara Elektronik									
		Jumlah izin/non izin sektor kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup yang diterbitkan	2750	-	2750	4008	146%	-	4008	100%
		Jumlah Pelaku Usaha yang Terasilitasi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Kewenangan Daerah Privinsi	1	-	-	-	-	5500	26534	482%
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor pembangunan dan perekonomian	2125	-	2125	1754	83%	-	-	100%
		Jumlah pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha sektor kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup	260	-	260	347	133%	-	-	100%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Terasilitasi Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Kewenangan Daerah Provinsi	1	-	-	-	-	2000	1315	66%
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	-	100	344	344%	-	344	100%
		Jumlah layanan konsultasi izin/non izin	2050	-	2050	1896	92%	-	-	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		Jumlah laporan izin dan non izin yang disusun	12	-	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Kewenangan Daerah Provinsi	1	-	-	-	-	2000	2502	125%
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah koordinasi pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	38	-	38	20	53%	-	-	100%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	38	-	-	-	-	38	3	8%
02.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kontribusi Perusahaan PMDN dan UKM Terhadap Realisasi Investasi	70	-	70	59,85	86%	65	62,78	96%
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100	-	100	200,64	201%	100	57	57%
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang dilaporkan oleh perusahaan	1100	-	1100	2383	217%	-	-	100%
		Jumlah perusahaan yang memperoleh pendampingan pengisian pelaporan kegiatan penanaman modal	60	-	60	100	167%	-	100	100%
		Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan	1	-	-	-	-	1000	2212	221%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
		Penanaman Modal								
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang difasilitasi permasalahan penanaman modal	12	-	12	12	100%	-	12	100%
		Jumlah perusahaan yang memahami peraturan penanaman modal	100	-	100	200	200%	-	200	100%
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	1	-	-	-	-	100	50	50%
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pendampingan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas penanaman modal	27	-	27	29	107%	-	29	100%
		Jumlah berita acara pengawasan penanaman modal	115	-	115	116	101%	-	116	100%
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	1	-	-	-	-	100	38	38%
02.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Yang Dapat Diakses	100	-	100	100	100%	100	100	100%
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia	100	-	100	100	100%	100	100	100%
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah pengembangan sistem informasi penanaman modal	1	-	1	1	100%	-	1	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Triwulan II tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*100
	Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
		Jumlah laporan kinerja penanaman modal terverifikasi	4	-	4	4	100%	-	4	100%
		Jumlah data penanaman modal yang dianalisis dan dievaluasi	1	-	1	1	100%	-	1	100%
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	1	-	-	-	-	2	2	100%

2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sampai dengan Semester II kebanyakan belum terlaksana terkait dengan Sub Keegiatannya. Hal ini dikarenakan panjangnya proses pengajuan terkait dengan regulasi yang akan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Program Pelayanan Penanaman Modal permasalahan yang dihadapi terkait dengan pembagian alokasi anggaran antar program dan kegiatan dan peruntukannya;
- Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sampai dengan Semester I berakhir kendala atau permasalahan yang dihadapi adalah perubahan kewenangan terkait dengan Anggaran Dana Dekonsentrasi yang semula ada di Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal sekarang ada di Sub Kegiatan Pemantauan Penanaman Modal;

Upaya Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Timur, antara lain :

- Menggali kembali permasalahan yang ada terus mengawal dan terus berkoordinasi kepada OPD terkait yang berkaitan dengan penerbitan regulasi di Provinsi Jawa Timur;
- Memaksimalkan sinergitas yang ada dalam masing-masing program yang menangani terkait dengan pelayanan perizinan berusaha;
- Tetap melaksanakan dan berkomitmen untuk memenuhi target yang ada meskipun tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur ditetapkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Penanaman Modal serta Tugas Pembantuan berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	TARGET SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2023
Meningkatkan Daya Saing Penanaman Modal		Nilai Realisasi Penanaman Modal (Trilyun)	85	112
	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Penanaman Modal (%)	6,3	12,5
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan	87	87
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	80,50	80,50

Untuk target Nilai Realisasi Penanaman Modal yang semula 85 Trilyun berubah menjadi 112 Trilyun. Hal ini dikarenakan menyesuaikan target yang diberikan oleh Kementerian Investasi/BKPM Republik Indonesia kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa timur. Kalau untuk indikator-indikator lain tetap dengan target yang ada sebelum Perubahan.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja (renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur mengacu kepada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, dimana rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selaras dengan RKPD.

Review Program dan kegiatan tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur terhadap RKPD dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.1
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2:18:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program PD yang Tercapai	Jawa Timur	77 %	27.671.659.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program PD yang Tercapai	Jawa Timur	77 %	27.396.659.000	
		Persentase Realisasi Anggaran	Jawa Timur	90 %			Persentase Realisasi Anggaran	Jawa Timur	90 %		
		Indeks Profesionalitas ASN	Jawa Timur	86,25			Indeks Profesionalitas ASN	Jawa Timur	86,25		
2.18.01.1. 01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jawa Timur	9 Dok	216.000.000	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Jawa Timur	9 Dok	216.000.000	
		Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Jawa Timur	4 Dok			Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	Jawa Timur	4 Dok		
2.18.01.1. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jawa Timur	4 Dok	130.252.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jawa Timur	4 Dok	130.252.000	
2.18.01.1. 01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jawa Timur	2 Dok	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jawa Timur	2 Dok	7.500.000	
2.18.01.1. 01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jawa Timur	2 Dok	5.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jawa Timur	2 Dok	5.500.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Dokumen Perubahan RKA- SKPD					Dokumen Perubahan RKA- SKPD				
2.18.01.1. 01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jawa Timur	2 Dok	3.758.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jawa Timur	2 Dok	3.758.000	
2.18.01.1. 01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jawa Timur	2 Dok	3.460.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jawa Timur	2 Dok	3.460.000	
2.18.01.1. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jawa Timur	5 Dok	59.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jawa Timur	5 Dok	59.500.000	
2.18.01.1. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	4 Dok	6.030.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	4 Dok	6.030.000	
2.18.01.1. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawa ban keuangan	Jawa Timur	12 Laporan	19.078.987.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawa ban keuangan	Jawa Timur	12 Laporan	19.084.189.000	
2.18.01.1. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	140 orang/bula n	18.241.116.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	140 orang/bul an	18.241.116.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	12 Dokumen	565.795.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	12 Dokumen	570.370.000	
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	12 Dokumen	235.165.500	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	12 Dokumen	235.792.500	
2.18.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	12 Dokumen	10.050.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	12 Dokumen	10.050.000	
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	2 Laporan	2.740.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	2 Laporan	2.740.500	
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jawa Timur	1 Dokumen	14.070.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jawa Timur	1 Dokumen	14.070.000	
2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S	Jawa Timur	12 Laporan	10.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S	Jawa Timur	12 Laporan	10.050.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		emesteran SKPD					emesteran SKPD				
2.18.01.1. 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jawa Timur	1 Laporan	-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jawa Timur	1 Laporan	-	
2.18.01.1. 03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	-	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jawa Timur	1 Laporan	-	
2.18.01.1. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jawa Timur	12 Laporan	2.344.930.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Jawa Timur	12 Laporan	1.721.330.000	
2.18.01.1. 05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jawa Timur	8 Unit	205.700.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jawa Timur	8 Unit	205.700.000	
2.18.01.1. 05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Timur	12 Dokumen	1.967.451.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jawa Timur	12 Dokumen	1.343.851.000	
2.18.01.1. 05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Timur	12 Dokumen	142.271.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Timur	12 Dokumen	142.271.000	
2.18.01.1. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Jawa Timur	4 Orang	29.508.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Jawa Timur	4 Orang	29.508.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Fungsi	Pelatihan				Fungsi	Pelatihan				
2.18.01.1. 05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jawa Timur	6 Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jawa Timur	6 Orang	-	
2.18.01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jawa Timur	1 Laporan	1.612.634.412	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Jawa Timur	1 Laporan	1.811.234.412	
2.18.01.1. 06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	15.095.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	15.095.700	
2.18.01.1. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	7 Paket	97.832.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	7 Paket	97.832.000	
2.18.01.1. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jawa Timur	3 Paket	219.407.200	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jawa Timur	3 Paket	219.407.200	
2.18.01.1. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	3 Paket	532.206.200	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	3 Paket	532.206.200	
2.18.01.1. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	120.888.812	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jawa Timur	1 Paket	120.888.812	
2.18.01.1.	Fasilitasi	Jumlah Laporan	Jawa	25	122.650.000	Fasilitasi	Jumlah Laporan	Jawa	25	122.650.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
06.08	Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Timur	Laporan		Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Timur	Laporan		
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	2 Laporan	504.554.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jawa Timur	2 Laporan	703.154.500	
2.18.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Timur	1 Dokumen	-	
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	1 Laporan	4.171.947.088	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	1 Laporan	4.246.745.088	
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jawa Timur	12 Laporan	1.698.364.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jawa Timur	12 Laporan	1.773.162.000	
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Laporan	90.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Laporan	90.000.000	
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Laporan	2.383.583.088	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jawa Timur	1 Laporan	2.383.583.088	
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara	Jawa Timur	1 Laporan	247.160.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara	Jawa Timur	1 Laporan	317.160.500	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jawa Timur	62 Unit	114.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jawa Timur	62 Unit	184.750.000	
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jawa Timur	116 Unit	79.619.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jawa Timur	116 Unit	79.619.200	
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1 Unit	52.791.300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jawa Timur	1 Unit	52.791.300	
2:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jawa Timur	4,00 dari Skala 5	1.689.742.000	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jawa Timur	4,00 dari Skala 5	1.989.742.000	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase fasilitas/insentif bidang penanaman modal yang diberikan	Jawa Timur	100 %	1.214.742.000	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah	Persentase fasilitas/insentif bidang penanaman modal yang diberikan	Jawa Timur	100%	1.314.742.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Provinsi					Provinsi					
2.18.02.1. 01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jawa Timur	1 Dokumen	464.742.000	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jawa Timur	1 Dokumen	564.742.000	
2.18.02.1. 01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Jawa Timur	8 Pelaku Usaha	750.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	Jawa Timur	8 Pelaku Usaha	750.000.000	
2.18.02.1. 02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Potensi Investasi Yang Siap Ditawarkan	Jawa Timur	100 %	475.000.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Potensi Investasi Yang Siap Ditawarkan	Jawa Timur	100%	675.000.000	
2.18.02.1. 02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Dokumen	175.000.000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jawa Timur	1 Dokumen	175.000.000	
2.18.02.1. 02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Jawa Timur	1 Dokumen	300.000.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	Jawa Timur	1 Dokumen	500.000.000	
2:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Komitmen/Rencana Penanaman Modal	Jawa Timur	40 Trilyun	2.021.974.000	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Komitmen/Rencana Penanaman Modal	Jawa Timur	40 Trilyun	2.287.349.000	
2.18.03.1.	Penyelenggara	Persentase Calon	Jawa	75 %	2.021.974.000	Penyelenggara	Persentase Calon	Jawa	75 %	2.287.349.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	an Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penanam Modal Yang Berminat	Timur			aan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Penanam Modal Yang Berminat	Timur			
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jawa Timur	1 Dokumen	625.000.000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jawa Timur	1 Dokumen	442.750.000	
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jawa Timur	25 Dokumen	1.396.974.000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jawa Timur	25 Dokumen	1.844.599.000	
2:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jawa Timur	87	3.928.149.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jawa Timur	87	4.078.149.000	
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	Jawa Timur	87 %	640.000.000	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	Jawa Timur	87 %	740.000.000	
		Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	Jawa Timur	100 %			Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	Jawa Timur	100 %		

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.18.04.1. 01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	100 Pelaku Usaha	382.000.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	100 Pelaku Usaha	382.000.000	
2.18.04.1. 01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Jawa Timur	100 Kegiatan Usaha	135.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Jawa Timur	100 Kegiatan Usaha	135.000.000	
2.18.04.1. 01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	140 Orang	100.000.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	140 Orang	200.000.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Non Perizinan					Non Perizinan					
2.18.04.1. 01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	38 Kegiatan Usaha	23.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	38 Kegiatan Usaha	23.000.000	
2.18.04.1. 02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	Jawa Timur	87 %	3.288.149.000	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	Jawa Timur	87 %	3.338.149.000	
		Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	Jawa Timur	100 %			Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	Jawa Timur	100 %		
2.18.04.1. 02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	5500 Pelaku Usaha	2.282.131.000	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	5500 Pelaku Usaha	2.323.256.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Jawa Timur	2000 Kegiatan Usaha	220.000.000	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	Jawa Timur	2000 Kegiatan Usaha	220.000.000	
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	2000 Orang	763.018.000	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	2000 Orang	771.893.000	
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	38 Kegiatan Usaha	23.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	Jawa Timur	38 Kegiatan Usaha	23.000.000	
2:18:05	PROGRAM PENGENDALIA	Persentase Kontribusi	Jawa Timur	70 %	1.463.660.000	Pengendalian Pelaksanaan	Persentase Perusahaan	Jawa Timur	70 %	1.473.285.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi				Penanaman Modal	PMA/PMDN Atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
2.18.05.1. 01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jawa Timur	100 %	1.463.660.000	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jawa Timur	100 %	1.473.285.000	
2.18.05.1. 01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jawa Timur	1000 Kegiatan Usaha	304.260.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jawa Timur	1000 Kegiatan Usaha	305.885.000	
2.18.05.1. 01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jawa Timur	100 Pelaku Usaha	741.396.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jawa Timur	100 Pelaku Usaha	747.396.800	
2.18.05.1. 01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jawa Timur	100 Kegiatan Usaha	418.003.200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Jawa Timur	100 Kegiatan Usaha	420.003.200	
2:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman	Jawa Timur	100 %	902.219.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman	Jawa Timur	100 %	952.219.000	

Kode	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	INFORMASI PENANAMAN MODAL	Modal Yang Dapat Diakses				INFORMASI PENANAMAN MODAL	Modal Yang Dapat Diakses				
2.18.06.1. 01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia	Jawa Timur	100 %	902.219.000	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia	Jawa Timur	100 %	952.219.000	
2.18.06.1. 01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Jawa Timur	2 Dokumen	902.219.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	Jawa Timur	2 Dokumen	952.219.000	
					37.667.403.000						38.177.403.000

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur mengacu kepada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023, dimana rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selaras dengan RKPD.

Rencana Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2:18:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Indikator Program PD yang Tercapai	77 %	Jawa Timur	Persentase Indikator Program PD yang Tercapai	77 %	Jawa Timur	27.671.659.000	27.396.659.000	Berkurang	APBD
		Persentase Realisasi Anggaran	90 %	Jawa Timur	Persentase Realisasi Anggaran	90 %	Jawa Timur				
		Indeks Profesionalitas ASN	86,25	Jawa Timur	Indeks Profesionalitas ASN	86,25	Jawa Timur				
2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 Dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	9 Dok	Jawa Timur	216.000.000	216.000.000		
		Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 Dok	Jawa Timur	Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah	4 Dok	Jawa Timur				
2.18.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dok	Jawa Timur	130.252.000	130.252.000		
2.18.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dok	Jawa Timur	7.500.000	7.500.000		
2.18.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dok	Jawa Timur	5.500.000	5.500.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
2.18.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dok	Jawa Timur	3.758.000	3.758.000		
2.18.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dok	Jawa Timur	3.460.000	3.460.000		
2.18.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Dok	Jawa Timur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Dok	Jawa Timur	59.500.000	59.500.000		
2.18.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	Jawa Timur	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	Jawa Timur	6.030.000	6.030.000		
2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	19.078.987.000	19.084.189.000	Bertambah	APBD
2.18.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang/bulan	Jawa Timur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 orang/bulan	Jawa Timur	18.241.116.000	18.241.116.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Jawa Timur	565.795.000	570.370.000		
2.18.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jawa Timur	235.165.500	235.792.500		
2.18.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	Jawa Timur	10.050.000	10.050.000		
2.18.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jawa Timur	2.740.500	2.740.500		
2.18.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	Jawa Timur	14.070.000	14.070.000		
2.18.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	10.050.000	10.050.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD						
2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jawa Timur	-	-		
2.18.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	Jawa Timur	-	-		
2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	12 Laporan	Jawa Timur	2.344.930.000	1.721.330.000	Berkurang	APBD
2.18.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit	Jawa Timur	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit	Jawa Timur	205.700.000	205.700.000		
2.18.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jawa Timur	1.967.451.000	1.343.851.000		
2.18.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	Jawa Timur	142.271.000	142.271.000		
2.18.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	4 Orang	Jawa Timur	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	4 Orang	Jawa Timur	29.508.000	29.508.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pendidikan dan Pelatihan			Pendidikan dan Pelatihan						
2.18.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Jawa Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	Jawa Timur	-	-		
2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	Jawa Timur	1.612.634.412	1.811.234.412	Bertambah	APBD
2.18.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	1 Paket	Jawa Timur	15.095.700	15.095.700		
2.18.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Jawa Timur	97.832.000	97.832.000		
2.18.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Jawa Timur	219.407.200	219.407.200		
2.18.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jawa Timur	532.206.200	532.206.200		
2.18.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jawa Timur	120.888.812	120.888.812		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25 Laporan	Jawa Timur	122.650.000	122.650.000		
2.18.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Jawa Timur	504.554.500	703.154.500		
2.18.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jawa Timur	-	-		
2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	Jawa Timur	4.171.947.088	4.246.745.088	Bertambah	APBD
2.18.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jawa Timur	1.698.364.000	1.773.162.000		
2.18.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jawa Timur	90.000.000	90.000.000		
2.18.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jawa Timur	2.383.583.088	2.383.583.088		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Aset Tetap yang Terpelihara	1 Laporan	Jawa Timur	247.160.500	317.160.500	Bertambah	APBD
2.18.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	62 Unit	Jawa Timur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	62 Unit	Jawa Timur	114.750.000	184.750.000		
2.18.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	Jawa Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	116 Unit	Jawa Timur	79.619.200	79.619.200		
2.18.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jawa Timur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jawa Timur	52.791.300	52.791.300		
2:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Indeks Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4,00 dari Skala 5	Jawa Timur	Indeks Kualitas Pengembangan Iklim Penanaman Modal	4,00 dari Skala 5	Jawa Timur	1.689.742.000	1.989.742.000	Bertambah	APBD
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang	Persentase fasilitas/insentif bidang penanaman modal yang diberikan	100 %	Jawa Timur	Persentase fasilitas/insentif bidang penanaman modal yang diberikan	100 %	Jawa Timur	1.214.742.000	1.314.742.000	Bertambah	APBD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi										
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	Jawa Timur	464.742.000	564.742.000		
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	8 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha Di Daerah	8 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	750.000.000	750.000.000		
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Persentase Potensi Investasi Yang Siap Ditawarkan	100 %	Jawa Timur	Persentase Potensi Investasi Yang Siap Ditawarkan	100 %	Jawa Timur	475.000.000	675.000.000	Bertambah	APBD
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	Jawa Timur	175.000.000	175.000.000		
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Provinsi	1 Dokumen	Jawa Timur	300.000.000	500.000.000		
2:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Komitmen/Rencana Penanaman Modal	40 Trilyun	Jawa Timur	Nilai Komitmen/Rencana Penanaman Modal	40 Trilyun	Jawa Timur	2.021.974.000	2.287.349.000	Bertambah	APBD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB TANGKUPAN/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Calon Penanam Modal Yang Berminat	75 %	Jawa Timur	Persentase Calon Penanam Modal Yang Berminat	75 %	Jawa Timur	2.021.974.000	2.287.349.000	Bertambah	APBD
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	Jawa Timur	625.000.000	442.750.000		
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	25 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	25 Dokumen	Jawa Timur	1.396.974.000	1.844.599.000		
2:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87	Jawa Timur	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	87	Jawa Timur	3.928.149.000	4.078.149.000	Bertambah	APBD
2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	87 %	Jawa Timur	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	87 %	Jawa Timur	640.000.000	740.000.000	Bertambah	APBD
		Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	100 %	Jawa Timur	Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	100 %	Jawa Timur				
2.18.04.1.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu	Jumlah Pelaku Usaha yang	100 Pelaku Usaha	Jawa Timur	Jumlah Pelaku Usaha yang	100 Pelaku Usaha	Jawa Timur	382.000.000	382.000.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
2.18.04.1.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	100 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	135.000.000	135.000.000		
2.18.04.1.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140 Orang	Jawa Timur	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	140 Orang	Jawa Timur	100.000.000	200.000.000		
2.18.04.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	38 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	38 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	23.000.000	23.000.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota			Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota						
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	87 %	Jawa Timur	Persentase layanan perizinan/non izin yang tepat waktu sesuai SOP	87 %	Jawa Timur	3.288.149.000	3.388.149.000	Bertambah	APBD
		Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	100 %	Jawa Timur	Persentase pengaduan dan layanan perizinan yang ditindaklanjuti	100 %	Jawa Timur				
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5500 Pelaku Usaha	Jawa Timur	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5500 Pelaku Usaha	Jawa Timur	2.282.131.000	2.323.256.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	2000 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Pelaku Usaha	2000 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	220.000.000	220.000.000		
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2000 Orang	Jawa Timur	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat Terkait Perizinan dan Non Perizinan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2000 Orang	Jawa Timur	763.018.000	771.893.000		
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	38 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kabupaten/Kota	38 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	23.000.000	23.000.000		
2:18:05	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Kontribusi	70 %	Jawa Timur	Persentase Kontribusi	70 %	Jawa Timur	1.463.660.000	1.473.285.000	Bertambah	APBD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi			Perusahaan PMDN dan UKM terhadap realisasi investasi						
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	Jawa Timur	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100 %	Jawa Timur	1.463.660.000	1.473.285.000	Bertambah	APBD
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	1000 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	304.260.000	305.885.000		
2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	Jawa Timur	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100 Pelaku Usaha	Jawa Timur	741.396.800	747.396.800		
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	100 Kegiatan Usaha	Jawa Timur	418.003.200	420.003.200		
2:18:06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 %	Jawa Timur	Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100 %	Jawa Timur	902.219.000	952.219.000	Bertambah	APBD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
		TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INFORMASI PENANAMAN MODAL	Yang Dapat Diakses			Yang Dapat Diakses						
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia	100 %	Jawa Timur	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang tersedia	100 %	Jawa Timur	902.219.000	952.219.000	Bertambah	APBD
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji, dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	Jawa Timur	902.219.000	952.219.000		
								37.667.403.000	38.177.403.000	Bertambah	APBD

BAB IV PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023, masih diperlukan konsistensi dari masing masing program untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Timur yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023, maka integrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain. Perubahan Renja Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2023 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya
NIP. 19680511 199403 2 009